

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejarah perkembangan perkebunan di negara berkembang, termasuk Indonesia, tidak dapat dipisahkan dari sejarah perkembangan kolonialisme, kapitalisme, dan modernisasi. Di negara-negara berkembang, pada umumnya perkebunan hadir sebagai perpanjangan dari perkembangan kapitalisme pada pertanian yang di perkenalkan melalui sistem ekonomi kolonial. Perkebunan pada awal perkembangannya hadir sebagai sistem perekonomian baru yang semula belum dikenal, yaitu sistem perekonomian pertanian komersial (*commercial agriculture*) yang bercorak colonial atau yang didirikan oleh korporasi kapitalis asing itu pada dasarnya adalah sistem perkebunan Eropa (*European plantation*), yang berbeda dengan sistem kebun (*garden system*) yang telah lama berlaku di negara-negara berkembang pada masa pra-kolonial. Sebagai sistem perekonomian pertanian baru, sistem perkebunan telah memperkenalkan berbagai pembaharuan penting terhadap kehidupan masyarakat tanah jajahan atau negara-negara berkembang. Karena itu perkembangan perkebunan di negara-negara berkembang berkaitan erat dengan proses modernisasi.¹

Berkembangnya sektor perkebunan di Indonesia khususnya pada masa kolonial ini pada satu sisi di anggap sebagai sesuatu yang memberikan keuntungan bagi masyarakat Indonesia. Keuntungannya yaitu memberikan pengetahuan tentang

¹ Sartono Kartodirdjo & Djoko Suryo, *Sejarah Pekebunan di Indonesia: Kajian Sosial-Ekonomi* (Yogyakarta: Aditya Media, 1991), hlm. 3

pertanian modern dan memberikan kesempatan pada perekonomian baru. Namun pada sisi lain, dianggap sebagai hambatan bagi diversifikasi ekonomi masyarakat yang lebih luas, sumber penindasan dan penyeskaraan, serta mengakibatkan terjadinya kemiskinan struktural dan kebudayaan. Bentuk eksploitasi ini dipusatkan pada pemanfaatan faktor produksi yang sangat kaya di Indonesia yaitu tanah dan tenaga kerja. Tersedianya faktor produksi perkebunan ini, maka pemerintah mengganti sistem tanaman tradisional (*tradisional corps*) dengan memperkenalkan sistem tanaman komersial (*commercial corps*) yang berarti membuka pedalaman Jawa bagi lalu lintas perdagangan dunia.²

Pada masa awal kedatangannya orang-orang Eropa tidak secara langsung melakukan penjajahan, tetapi diawali dengan melakukan transaksi pembelian dengan orang-orang bumi putera yaitu berupa hasil-hasil perkebunan. Melihat hasil perkebunan yang melimpah memunculkan keinginan mereka untuk menguasai perdagangan komoditi yang berasal dari Nusantara sehingga pada tahun 1602 mereka mendirikan perkumpulan dagang dengan nama *Verenigde Oost-Indische Compagnie* (VOC) yang bertujuan untuk memonopoli semua kegiatan perdagangan yang ada di Nusantara.

Sejak masa tradisional sampai masa penjajahan VOC (*Vereenigde Oost-Indische Compagnie*, yaitu pada abad ke 17-18, sistem usaha kebun menjadi sumber produksi komoditi perdagangan yang penting. Bahkan pada masa VOC sistem usaha kebun rakyat menjadi sumber eksploitasi komoditi perdagangan untuk pasaran

² Suhartono, *Bandit-bandit Pedesaan: Studi Historis 1850-1942 di Jawa* (Yogyakarta: Aditya Media, 1995), hlm. 1

Eropa. Sistem penyerahan paksa dan kontingen yang dipakai VOC untuk mengeksploitasi produksi komoditi ekspor itu, malahan sempat diteruskan sampai awal abad ke-19, sekalipun pemerintahan jajahan telah berganti ke tangan pemerintah Hindia Belanda sejak tahun 1800-an.³

Secara pokok pertumbuhan sistem perkebunan pada masa kolonial mengalami dua fase perkembangan, yaitu dari fase perkembangan industri perkebunan negara ke fase industri perkebunan swasta. Fase awal dari perkembangan perkebunan ditandai dengan kecenderungan politik pemerintah kolonial Belanda untuk meneruskan kebijakan politik eksploitasi (*drainage politiek*) yang dijalankan oleh VOC dengan melakukan penyerahan paksa. Hal ini dirasa sangat cocok untuk mengelola Indonesia sebagai daerah “*wingewest*”, atau daerah yang menguntungkan negeri induk.⁴

Pada tahun 1830 pemerintah Hindia Belanda melakukan eksploitasi dengan penyerahan paksa dengan mengeluarkan kebijakan berupa mengharuskan menanam tanaman yang memiliki nilai jual tinggi di pasaran Eropa. Kebijakan ini lebih di kenal dengan nama *Cultuurstelsel*. Kebijakan ini bertujuan untuk mendapatkan dan menguasai komoditi ekspor sebanyak-banyaknya dengan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari hasil komoditi perkebunan. Orang-orang pribumi harus menyerahkan Sebagian tanah dan tenaga kerja mereka untuk menanam dan menggarap tanaman perdagangan yang laku di pasaran Eropa. Sistem ini telah mengubah perkembangan perekonomian di Jawa.

³ Sartono Kartodirdjo & Djoko Suryo, *op.cit* hlm.10

⁴ Sartono Kartodirdjo & Djoko Suryo, *ibid*

Pemerintah Hindia Belanda yang dipimpin oleh Gubernur Jenderal Van den Bosch dalam sistem tanam paksa ini menginginkan dan menjadikan Jawa sebagai asset yang menguntungkan bagi Belanda. Dalam tempo yang singkat dapat menghasilkan komoditi pertanian tropis terutama kopi, gula dan indigo yang saat itu menjadi primadona dunia dengan mendapatkan harga yang sangat murah, sehingga dapat bersaing dengan produk serupa yang berada di belahan bumi lain. Dalam hal ini, perkebunan mengalami peningkatan produktivitas dikarenakan untuk mengejar target dan untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya, sehingga bisa mengalahkan pedagang pesaing Belanda yang lain dari perdagangan International.⁵

Munculnya perusahaan-perusahaan perkebunan di Jawa Timur tidak lepas dari pengaruh kebijakan Undang-Undang Agraria tahun 1870, membuat kebijakan Sistem Tanam Paksa menjadi kendur karena banyak kritikan. Selain itu kegiatan monopoli juga dibubarkan, kemudian menjamin kontrak sewa tanah dalam jangka panjang. Undang-undang tersebut menjadi keuntungan bagi pihak swasta sebagai kesempatan untuk investasi dalam dunia ekonomi dengan pembukaan perkebunan baru. Tanaman yang ditanam di perkebunan sangat beragam ada kopi, teh, kina, indigo, cengkeh dan juga kakao.

Masuknya tanaman kopi ke Indonesia tercatat sejak tahun 1696, Ketika Peter Admiral van Broecke mengadakan perdagangan dengan pedagang Arab. Bibit kopi di datangkan dari Malabar (India) berjenis Arabika, kemudian mulai

⁵ Robert van Niel, *Sistem Tanam Paksa di Jawa* (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2003), hlm.6

dibudidayakan di Priangan, sebelum akhirnya berkembang ke wilayah lain seperti Sumatra dan Sulawesi.⁶

Penghapusan sistem tanam paksa dan dialihkannya perkebunan negara ke pengusaha swasta semakin mengencangkan eksploitasi kekayaan alam Hindia Belanda. Tanah-tanah milik negara dan juga rakyat disewakan ke pihak swasta untuk dikelola menjadi perkebunan. Pihak-pihak swasta diberikan kewenangan menyewa tanah dalam jangka waktu tertentu. Mereka bisa menyewa tanah milik pemerintah dengan jangka waktu hingga 75 tahun, serta antara 5 dan 20 tahun untuk tanah milik rakyat. Pihak-pihak swasta yang mengendalikan penanaman tersebut berasal dari golongan asing. Mereka termasuk orang-orang Eropa dan Timur Asing. Koneksi mereka yang begitu luas dan juga karena status mereka yang lebih istimewa dibandingkan dengan pribumi itu sendiri, membuat mereka lebih mudah mengembangkan usahanya. Terbukti dengan adanya campur tangan mereka, produksi komoditas-komoditas ekspor mengalami banyak peningkatan daripada sebelumnya.⁷

Salah satu wilayah perkebunan di Jawa Timur yang memiliki banyak perkebunan adalah Kediri. Kawasan Kediri memiliki iklim yang sejuk selain itu terdapat pula gunung vulkanik yang masih aktif. Melihat kondisi alam di Kediri yang sejuk dan terdapat gunung vulkanik sehingga memungkinkan Kediri dijadikan

⁶ James Spillane, *Komoditi Kopi: Peranannya Dalam Perekonomian Indonesia* (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm.41

⁷ M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*, (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2008), hlm. 269.

penanaman modal bagi swasta dengan pembukaan wilayah perkebunan-perkebunan yang baru.

Secara geografis Kediri daerah yang memiliki kontur berupa daerah bukit, lembah, dan gunung. Gunung yang masih aktif hingga saat ini adalah Gunung Kelud. Gunung ini memiliki peranan penting bagi kelangsungan hidup penduduk Kediri dan sekitarnya. Aktivitas gunung berupa erupsi sehingga daerah yang terpapar erupsi menjadi sebuah kawasan yang begitu subur. Hal ini merupakan modal besar bagi keberlangsungan perkebunan. Tanah-tanah vulkanis adalah tanah yang sangat cocok bagi terbentuknya perkebunan. Hal ini sejalan dengan keinginan pemerintah kolonial untuk mendapatkan keuntungan yang besar dari hasil perkebunan.

Buruh-buruh di perkebunan terdiri dari pria, wanita, dan juga anak-anak. Mereka terkadang harus berjalan jauh menuju tempat bekerja karena letak desa mereka jauh dari perkebunan. Kemudian aktivitas yang dilakukan setiap harinya oleh para buruh perkebunan kopi adalah pembibitan, penanaman, pemetikan, dan pengangkutan serta pengeringan kopi. Untuk tugas buruh laki-laki biasanya di posisikan sebagai pengolahan tanah hutan, pengangkutan, pengeringan, dan penjemuran, sedangkan buruh perempuan sebagai pengayak kopi kering dan pemetik biji kopi. Tercatat buruh perkebunan kopi di Kediri sekitar 800 orang yang terdiri dari 500 buruh perempuan dan 300 buruh laki-laki. Menurut pembukuan dari

beberapa perusahaan, ditemukan bahwa seorang perempuan pada masa pra, pertengahan dan pasca panen hanya memetik sekitar 25 biji yang siap panen.⁸

Sistem perekrutan buruh tidak semudah yang diharapkan para pemilik modal. Mereka yang jarang melakukan kontak langsung dengan para buruh terampil dan tidak terampil, memilih berhubungan dengan para buruh dari Indonesia melalui para mandor. Biasanya yang menjadi mandor adalah para kepala desa atau tokoh penguasa bumiputera. Mandor ini memiliki tanggungjawab besar atas disiplin kerja dan mengatur distribusi pekerjaan ditempat-tempat kerja. Sebagai penengah antara pemilik modal dan buruh.⁹

Kondisi kehidupan buruh perkebunan di Kediri masih ada beberapa kekurangan. Kehidupan yang sangat layak masih jauh, karena mereka masih bermukim di gubug-gubug. Para buruh perkebunan kopi di Kediri melakukan tindak kriminal seperti melakukan pencurian kopi diperkebunan untuk dikonsumsi sendiri atau dijual pada orang Tionghoa. Mereka melakukan aksinya secara berkelompok, terdiri dari 40 hingga 60 orang yang bersembunyi di dataran tinggi dan turun ke perkebunan jika melihat medannya sudah aman. Mereka juga mempersenjatai diri mereka untuk melawan para pengawas dan penjaga perkebunan.¹⁰

⁸ “Benaderende opgave van werkvolk in de naaste toekomst vereischt voor de particuliere koffiecultuur in de Resident Kediri” *De locomotief*, 26 November 1892

⁹ John Ingelson, *Perkotaan, Masalah Sosial & Perburuhan Di Jawa Masa Kolonial*, hlm 96

¹⁰ “Koffiediestallen”, *Het Vederland*, 28 Juli 1925

Kemudian pada tahun 1930an terjadi depresi ekonomi dunia. Masa depresi ekonomi adalah masa-masa sulit bagi perkebunan-perkebunan di Hindia Belanda. Sebelumnya perekonomian Hindia Belanda bertumpu pada aktivitas perkebunan yang menjual hasil perkebunannya ke pasaran dunia. Dengan adanya depresi ekonomi tersebut terjadi penurunan permintaan dan transportasi pada aktivitas ekspor-impor menjadi terkendala. Kendala ekspor-impor tersebut memicu permasalahan dalam produksi, yang mana ketika produksi masih berjalan sedangkan permintaan mengalami penurunan, maka terjadi penumpukan barang produksi. Penumpukan barang produksi tersebut merupakan masalah bagi para pengusaha. Proses produksi pada perkebunan yang berkaitan langsung dengan para buruh membuat mereka juga terkena imbasnya. Para pengusaha membuat keputusan untuk mengurangi upah buruhnya hingga pengurangan jumlah buruh demi menyelamatkan usahanya.¹¹

1.2 Rumusan Masalah

Sistem ekonomi liberal di Indonesia dimulai sejak dikeluarkan Undang-undang Agraria yang lebih dikenal dengan *Agrarische Wet*. Kebijakan ini memberi keuntungan besar bagi perusahaan-perusahaan perkebunan swasta. Keuntungan yang didapatkan pada masa ini tidak sebanding pada saat diterapkannya Sistem Tanam Paksa. Hal ini disebabkan karena dominasi kerajaan atau kerajaan terhadap negara jajahan dirasa terlalu kuat. Setelah muncul kebijakan *Agrarische Wet*

¹¹ John Ingleson, *Tangan dan Kaki Terikat: Dinamika Buruh, Sarekat Kerja dan Perkotaan Masa Kolonial*, (Jakarta: Komunitas Bambu, 2004), hlm. 105.

memberikan dampak yang signifikan disetiap elemen seperti perluasan lahan, memakai tenaga kerja upahan, dan pelayanan dan transportasi angkut komoditas hasil ekspor.

Pada tahun 1870-an ini lahirlah sebuah rezim kolonial baru, yang di dalamnya para pengusaha swasta yang mengelola perkebunan-perkebunan besar dan pabrik-pabrik dengan memakai tenaga kerja upahan dan tanah memainkan peran sangat penting. Membahas mengenai sejarah perkebunan di Indonesia tidak terlepas dari faktor-faktor pendukung kegiatan perkebunan seperti modal, tenaga kerja, upah serta ketersediaan lahan dan hasil dari produksi di perkebunan serta kebijakan-kebijakan yang berlaku pada periode tersebut berpengaruh juga dalam kelangsungan hidup di perkebunan.

Permasalahan utama yang dibahas dalam penelitian ini adalah tentang buruh perkebunan kopi yang berada di Kediri yang dimulai dari tahun 1870-1930. Mula-mula yang perlu dilakukan dengan mengajukan pertanyaan Bagaimana kondisi buruh perkebunan kopi di Kediri tahun 1870-1930?

1.3 Manfaat dan Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kondisi buruh perkebunan kopi dan faktor yang mempengaruhi perkembangan perkebunan kopi di Kediri. Namun juga menyinggung tahun-tahun sebelumnya dan sesudah temporal yang di ambil guna mendapatkan informasi yang lebih mendalam yang digunakan untuk melihat perkembangan dan perubahan dan sebagai bahan pembanding, sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran tentang buruh perkebunan kopi di Kediri.

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan bagaimana dampak depresi ekonomi terhadap buruh perkebunan kopi di Kediri. Dalam penelitian diharapkan dapat mendeskripsikan kondisi buruh perkebunan kopi di Kediri pada masa ekonomi liberal hingga masa depresi ekonomi.

Manfaat penulisan ini secara umum adalah untuk memberikan sumbangan keilmuan khususnya dalam bidang sejarah. Dengan penelitian ini diharapkan mampu membuka wawasan serta pengetahuan dan menjadi acuan bagi siapapun untuk mengembangkan wilayah Kediri dengan berkaca pada masa lalu supaya ke depan dapat dijadikan cerminan untuk perkembangan perekonomian.

1.4 Batasan dan Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil ruang lingkup spasial di Kediri, khususnya Kabupaten Kediri yang memiliki tanah yang subur akibat dari aktivitas vulkanis Gunung Api Kelud. Hal itu merupakan wilayah yang cocok untuk dikembangkan sebagai wilayah perkebunan seperti perkebunan kopi. Tulisan ini membahas buruh perkebunan kopi yang ada di Kediri.

Tema ini mengambil batasan penelitian pada tahun 1870-1930. Tahun 1870 sebagai awal penelitian ini dikarenakan pada masa Pemerintah Hindia Belanda membuka kepada peluang pengusaha swasta untuk melakukan kontrak sewa tanah kepada penduduk maupun pemerintah untuk membuka perkebunan. Kemudahan pengusaha swasta dalam membuka usahanya tersebut juga tidak luput dari situasi politik yang terjadi pada masa itu. Pada masa tersebut sedang terjadi oposisi pada kursi parlemen yang pada akhirnya dimenangkan oleh golongan

liberal. Kemenangan golongan liberal pada parlemen Belanda telah mempengaruhi kebijakan yang diterapkan di Belanda maupun di Hindia. Para golongan liberal mendesak adanya penghapusan sistem tanam paksa di Hindia. Sistem tersebut dirasa telah menyengsarakan rakyat dan sudah saatnya untuk melakukan perubahan.¹² Selain itu juga terdapat desakan kepada pemerintah agar pihak swasta diberikan ruang untuk melakukan usaha di Hindia. Itu sebabnya ketika golongan liberal menguasai parlemen Belanda, para pengusaha swasta lebih leluasa menanamkan modalnya di Hindia. Para pengusaha swasta tersebut umumnya menanamkan modalnya di Hindia untuk membuka usaha perkebunan.

Ketika sistem tanam paksa masih diberlakukan secara luas, sistem kerja pada buruh yaitu dengan kerja wajib. Namun setelah sistem tanam paksa secara perlahan dihapuskan, maka sistem kerja yang diterapkan adalah sistem kerja bebas. Dengan adanya penerapan sistem kerja bebas ini diharapkan dapat mampu meningkatkan kesejahteraan buruh perkebunan. Namun kebijakan sistem kerja bebas yang diterapkan oleh pemerintah Kolonial Belanda rupanya belum mampu menolong para buruh perkebunan.

Kemudian tahun 1930 sebagai batas akhir penelitian ini dikarenakan pada tahun tersebut terdapat masalah sosial-ekonomi yang terjadi akibat krisis ekonomi. Krisis ekonomi yang melanda telah mempengaruhi kondisi sosial-ekonomi di Hindia Belanda. Permintaan dan harga barang-barang hasil perkebunan mengalami gejolak. Sehingga Hindia Belanda yang merupakan pengekspor besar barang-

¹² J.S. Furnivall, *Hindia Belanda Studi tentang Ekonomi Majemuk*, (Jakarta: Freedom Institute, 2009), hlm. 174.

barang hasil perkebunan terkena dampaknya. Dengan adanya kondisi tersebut menjadikan para pemilik perkebunan memberikan kebijakan pengurangan jumlah buruh pada perusahaannya. Pengurangan jumlah buruh tersebut menjadikan pengangguran marak terjadi di Hindia Belanda.

1.5 Tinjauan Pustaka

Penulisan dan penelitian yang bertema perkebunan kopi pada masa kolonial pada umumnya sudah banyak yang menulis. Akan tetapi penulisan buruh perkebunan kopi di Kediri pada masa kolonial belum banyak yang meneliti sehingga penulisan berkeyakinan bahwa penelitian yang berjudul “Buruh Perkebunan Kopi di Kediri pada tahun 1870-1930” belum pernah di tulis.

Adapun buku-buku yang berhubungan dan dapat menjadi acuan dalam penulisan ini salah satunya adalah buku yang berjudul “*Sejarah Perkebunan di Indonesia*” karya Sartono Kartodirdjo dan Joko Suryo.¹³ Buku ini merupakan buku induk dalam berbagai penulisan yang berhubungan dengan perkebunan. Buku ini menjelaskan mengenai sejarah perkebunan mulai dari perkebunan tradisional hingga perkebunan kolonial. Dari masa kolonial hingga Orde Baru. Diawal buku ini menjelaskan mengenai sejarah awal terbentuknya perkebunan di Indonesia. Memang dalam proses awal sejarah perkebunan di Indonesia tidak lepas dari praktek kolonialisme yang membawa pengaruh dalam terbentuknya perkebunan. Buku ini memberikan gambaran tentang latar belakang historis sehingga keadaan saat itu dipahami sebagai kelanjutan perkembangan masa kolonial. Kemudian ada

¹³ Sartono Kartodirdjo dan Joko Suryo, *loc.cit*

buku karya Dwi Retnandari dan Moeljarto Tjokrowinoto yang berjudul “Kopi: Kajian Sosial-Ekonomi” buku ini membahas tentang bagaimana awal masuknya kopi di Indonesia sampai datangnya di Jawa.

M.C. Rickleffs (2008) dalam bukunya berjudul *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*. Buku ini membantu penulis untuk mengetahui gambaran tentang perkebunan yang tidak hanya monopoli Pemerintah Kolonial tetapi juga adanya Undang-Undang Agraria yang mempengaruhi sistem perkebunan di Hindia Belanda. Dalam buku ini dijelaskan juga bahwa tidak hanya orang Jawa yang memiliki tanah tetapi orang asing juga dapat memiliki tanah tersebut dengan cara menyewa dari pemerintah.¹⁴ Berdasarkan penjelasan buku tersebut penulis dapat melihat faktor adanya sistem perkebunan kopi di Jawa dan kepemilikan tanahnya.

John Ingleson (2004) dalam buku yang berjudul *Tangan dan Kaki Terikat: Dinamika Buruh, Sarekat Kerja dan Perkotaan Masa Kolonial*. buku ini membahas mengenai dinamika dan gerakan buruh di Indonesia. Kemudian menjelaskan mengenai dinamika kota yang memberikan suatu gambaran tentang awal dari gerakan buruh yaitu kehidupan dan kondisi kerja di masa kolonial pada Jawa tahun 1910 dan 1920-an. Adanya kondisi perburuhan yang tercermin lewat pemogokan buruh kereta api yang meletus tahun 1923. Buku ini membantu penulis untuk melihat kondisi dari kehidupan para buruh di Indonesia khususnya di Jawa pada tahun 1910 dan 1920-an sehingga buku ini menjadi rujukan dalam tulisan ini.

¹⁴ M.C. Rickleff, *Op.cit*, hlm. 271.

John Ingleson (2004), dalam buku yang berjudul *Perkotaan Masalah Sosial & Perburuhan di Jawa Masa Kolonial*. Buku ini membahas tentang dibentuknya sarekat buruh utama yang dibentuk pada tahun 1908. Kemudian di dalam buku tersebut dijelaskan tentang perburuhan yang spesifikasinya di Jawa dan masa kolonial mengalami depresi ekonomi pada tahun 1930. Kemudian adanya buruh upahan juga dijelaskan dalam buku tersebut.¹⁵ Buku karya John Ingleson memberikan gambaran penulis tentang perkotaan menjadikan masalah sosial dan masa kolonial buruh di Jawa dijadikan sebagai buruh upahan.

Emil W. Aulia (2006), dalam buku yang berjudul *Berjuta-juta dari Deli: Satoe Hikayat Koeli Contract*.¹⁶ Buku ini menjelaskan tentang persoalan kaum buruh dan pengusaha. Kaum buruh selalu menuntut agar mereka memperoleh upah dan fasilitas yang layak, sedangkan untuk kelangsungan suatu perusahaan, para pengusaha berusaha membayar tenaga kerja buruh seminimal mungkin untuk menekan ongkos produksi mereka. Kemudian di dalam buku ini juga memberikan sebagian dari apa yang dialami oleh para buruh Jawa ketika mereka dijadikan sebagai kuli kontrak di Deli-Sumatera Timur. Dalam buku ini memberikan gambaran tentang kaum buruh yang memperoleh upah dan fasilitas yang tidak layak pada masa kolonial dan adanya permainan kecurangan dalam perkebunan tersebut

¹⁵ John Ingleson, *Perkotaan Masalah Sosial & Perburuhan di Jawa Masa Kolonial*, (Depok: Komunitas Bambu, 2004), *op.cit* hlm. 91.

¹⁶ Emil W. Aulia, *Berjuta-juta dari Deli: Satoe Hikayat Koeli Contract*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006)

Selanjutnya jurnal karya Indah Ningtyas Oktasari dan Agus Trilaksana yang berjudul “*Perkebunan Kopi Rakyat di Jawa Timur 1920-1942*.”¹⁷ Jurnal terbitan AVATARA, Volume 2, No 1, Maret 2014, Fakultas Ilmu Sosial UNESA. Jurnal ini membahas tentang perkebunan kopi rakyat di Jawa Timur yang dilatar belakangi oleh peningkatan hasil kopi sekitar tahun 1920-an, alasannya adalah setelah sebelumnya terjadi penurunan ketika tanaman kopi terserang hama penyakit karat daun (*Hemelia Vestatrix*). Kemudian dilanjutkan dengan kebangkitan komoditi kopi masa kolonial. Sebelumnya telah di ketahui bahwa pasca diberlakukannya Undang-Undang Gula 1870 telah terjadi perombakan besar-besaran pada daerah perkebunan khususnya di Jawa Timur.

1.6 Kerangka Konseptual

Fokus penelitian ini adalah masalah buruh perkebunan yang ada di Kediri pada tahun 1870-1930. Pengenalan perkebunan kolonial menurut Sartono dan Djoko Suryo adalah pola perubahan dari sistem perekonomian pada sistem kebun yang sudah lama berkembang pada masyarakat beralih menjadi perekebunan yang bercorak komersial. Sistem komersial ini diperkenalkan melalui sistem perkebunan gaya Eropa (*European plantation*) yang diterapkan pada negara-negara jajahan. Pengenalan sistem baru ini tentu membawa dampak perubahan penting dalam sistem perekonomian masyarakat jajahan. Dimana pada awalnya perkebunan

¹⁷ Indah Ningtyas Oktasari dan Agus Trilaksana, *Perkebunan Kopi Rakyat di Jawa Timur 1920-1942* (Surabaya: Universitas Negeri Surabaya)

bersifat tradisional dan kolektif, karena dampak dari modernisasi maka sistem perkebunan menjadi padat modal dan komersil.¹⁸

Ekonomi perkebunan yang di jalankan pada masa pemerintah kolonial Hindia-Belanda mempunyai sifat eksploratif dan menghisap. Dimana segala bentuk kegiatan perekonomian didasarkan pada siapa yang memiliki modal lebih banyak, maka keuntungan yang didapatkan juga sebesar-besarnya. Eksploitasi yang dimaksud berupa pengambilalihan atau penguasaan alat-alat produksi oleh segelintir orang (pemodal). Alat-alat produksi tersebut meliputi tanah, tenaga kerja yang berasal dari penduduk pribumi. Karl Marx mengatakan bahwa sistem ekonomi kapitalis menekankan kepada efisiensi yang bergantung pada mekanisme pasar. Karl Marx juga mengatakan, dalam sistem kapitalis juga memunculkan konflik antar kelas yakni pemilik modal dengan sekelompok kaum buruh (tenaga kerja perkebunan).¹⁹ Hal ini tentu sesuai dengan kondisi masyarakat perkebunan di era kolonial dimana kegiatan eksploitasi atas manusia banyak dilakukan. Pemodal atau investor yang menanamkan modal mendapat akumulasi keuntungan yang diperoleh dari kegiatan produksi perkebunan.

Ekonomi pertanian maupun perkebunan dapat mencakup analisa mengenai ekonomi dari proses (teknis) produksi dan hubungan-hubungan sosial dalam produksi pertanian, hubungan-hubungan antara faktor-faktor produksi, antara faktor hasil produksi dan antara beberapa hasil produksi dalam satu proses produksi. Kemudian dalam skala besar diharapkan dapat menghubungkan

¹⁸ Sartono Kartodirdjo & Djoko Suryo, *loc.cit.*

¹⁹ Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007) hlm. 74

persoalan-persoalan lapangan tenaga kerja, dan pembangunan secara menyeluruh.²⁰

Perkebunan merupakan sumber penghasilan utama pada masa kolonial dan menjadikan Jawa secara khusus dipilih sebagai wilayah utama pengembangan perkebunan. Pemilihan tersebut tidak lain karena di Jawa tersedia tanah dan buruh yang murah sehingga biaya produksi menjadi rendah. Modal-modal swasta mulai masuk ke Hindia dan membuat para penduduk pribumi semakin merasakan dampaknya. Dengan kemunculan modal swasta banyak dibangun industri perkebunan yang memiliki pola kerja industri, yang mana merupakan gabungan dari kerja agrikultur penanaman tanaman ekspor dengan kerja manufaktur.²¹ Dengan kemunculan industri-industri tersebut semakin menarik penduduk pribumi untuk menjadi buruh.

Penggunaan Istilah tenaga kerja, buruh, dan kuli sering muncul dalam penelitian ini. Perbedaan istilah tersebut timbul karena adanya klasifikasi kelas yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, sosial, budaya dan politik. Tenaga kerja adalah buruh di dalam maupun di luar hubungan kerja dengan alat produksi utamanya dalam proses produksi menggunakan tenaganya baik fisik maupun pikiran. Ciri khas dari hubungan kerja tersebut adalah bekerja dibawah perintah orang lain dengan menerima upah.²²

²⁰ Mubyarto, *Pengantar Ekonomi Pertanian* (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm 2-3

²¹ Edi Cahyono, *Pekalongan 1830-1870: Transformasi Petani Menjadi Buruh Industri Perkebunan*, (TT: Edi Cahyono's Experience, 2005), hlm. ii.

²² Menurut pasal 1 Undang-Undang tahun Presiden Republik Indonesia no.14 tahun 1969.

Pada masa feodal dahulu istilah buruh hanya digunakan untuk orang yang melakukan pekerjaan tangan atau pekerjaan kasar seperti kuli, tukang, dan lain-lain. Orang-orang yang melakukan pekerjaan “halus”, terutama yang mempunyai pangkat Belanda menamakan diri sebagai pegawai. Hal ini sama dengan pegawai negeri yang berkedudukan sebagai priayi.²³

Sedangkan pengertian dari beberapa pendapat, tenaga kerja adalah satu aspek yang sangat berpengaruh terhadap semua perkembangan perekonomian di dunia dan tonggak utama dalam perekonomian suatu bangsa. Dalam tenaga kerja terdapat istilah buruh. Pengertian buruh menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Sedangkan menurut pendapat yang lain buruh adalah penduduk yang mencari nafkah dan bekerja, para buruh tersebut bekerja pada pemilik modal.²⁴

Buruh dalam hal ini juga bisa dikaitkan dengan para petani yang bekerja pada tanah-tanahnya yang disewa untuk penanaman oleh pemerintah maupun pengusaha. Sehingga selain mendapatkan uang sewa tanah, mereka juga mendapatkan upah sebagai buruh pada perkebunan yang mereka kerjakan. Buruh banyak tersedia dan bisa didapatkan dengan mudah melalui perekrutan oleh pejabat pribumi. Keterlibatan pejabat pribumi dalam perekrutan dikarenakan pemerintah

²³ Iman Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: Djambatan, 1982), hlm. 26.

²⁴ Menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003.

kolonial Belanda maupun para pengusaha tidak ingin terlibat secara langsung dengan para penduduk pribumi.²⁵

Perekrutan buruh ini semula merupakan bentuk dari pembayaran pajak kepada pemerintah dengan menyumbangkan tenaganya dalam kerja paksa. Namun seiring dengan dihapuskannya sistem tanam paksa, mulailah diberlakukan sistem kerja baru yang dinamakan sistem kerja bebas. Sistem ini diharapkan dapat membantu rakyat Hindia terbebas dari kesengsaraan dan menaikkan kesejahteraan mereka. Ketika sistem tanam paksa masih diberlakukan, dikenal ada empat kategori kerja yang wajib dilakukan oleh rakyat. Keempat kerja wajib tersebut adalah tanam paksa, kerja paksa untuk pribumi (*pantjendiensten*), kerja paksa untuk pekerjaan umum (*heerendiensten*), dan kerja paksa untuk desa (*desadiensten*). Keharusan kerja tersebut bergantung pada adat-istiadat lokal seperti di Jawa Tengah, wilayah orang Jawa, keharusan kerja dikaitkan dengan menduduki tanah. Sedangkan di wilayah Sunda dan Madura, masing-masing di Jawa Timur dan Jawa Barat keharusan kerja dikaitkan dengan rumah tangga atau sepenuhnya individual.²⁶

Kebimbangan yang dialami oleh pengusaha perkebunan yang mendukung dihapuskannya kerja paksa. Pada satu sisi mereka menginginkan dihapuskannya kerja paksa demi membantu penduduk Jawa agar lebih sejahtera. Namun di sisi lain, jika mereka menghapuskan kerja paksa, maka mereka akan kesulitan memperoleh buruh. Sebab buruh mereka dapatkan melalui perekrutan dari penduduk yang melakukan kerja paksa kepada pejabat-pejabat pribumi. Hal lain yang menjadi

²⁵ John Ingelson, *op.cit* hlm 96

²⁶ J.S. Furnivall, *op.cit.*, hlm. 195.

kekhawatiran para pengusaha adalah mereka berharap mendapatkan suplai buruh yang lebih besar ketika penduduk dibebaskan dari kewajiban negara. Tetapi di sisi lain, jika negara benar-benar menghapuskan kerja paksa dan menggantikannya dengan kerja bebas, maka akan ada persaingan dalam mendapatkan suplai buruh yang akibatnya akan menaikkan tingkat upah. Serta pembayaran buruh oleh negara yang menuntut adanya tambahan pemasukan, dengan pajak yang lebih besar menjadi beban baru bagi industri. Hal-hal demikian menjadikan suatu kekhawatiran dan kewaspadaan hingga akhirnya sistem kerja tidak bisa dihapuskan sepenuhnya. Pada akhirnya kekuatan liberalisme perlahan hilang dari kekuasaan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan dengan ilmu-ilmu sosial lain, salah satunya adalah pendekatan ekonomi. Pendekatan teori ekonomi Karl Marx digunakan untuk membantu menganalisis permasalahan yang akan dibahas. Menurut Karl Marx pertentangan masyarakat terjadi dalam suatu kegiatan ekonomi dikarenakan alat-alat produksi dan bahan-bahan material menjadi hak milik individu atau pemilik modal. Para individu yang tidak memiliki alat-alat produksi dan bahan material akan menjadi para buruh. Kemudian menurut Karl Marx juga telah melakukan eksploitasi terhadap para buruh. Pemilik modal menggaji buruh secara sewenang-wenang. Para buruh diupah tidak sesuai dengan apa yang telah mereka produksi. Teori ini sesuai dengan kondisi buruh perkebunan kopi di Kediri dimana adanya kesenjangan antara pemilik modal dengan buruh. Berdasarkan penelitian, penulis menitikberatkan terhadap kehidupan buruh perkebunan kopi di Kediri tahun 1870-1930.

1.7 Metode Penelitian

Metode merupakan salah satu ciri dan cara kerja ilmiah yang penting dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian sejarah sudah terdapat metode yang disepakati secara umum untuk mengkajinya.²⁷ Metode yang digunakan dalam penulisan sejarah untuk memperoleh data dan fakta yang harus diungkapkan secara objektif. Dalam penulisan dan merekonstruksi peristiwa sejarah mempunyai metode tersendiri yang dikumpulkan dalam empat tahapan penyusunan, yakni heuristik, kritik interpretasi dan historiografi.²⁸

Heuristik yang dikenal dengan nama lain pengumpulan sumber, mengkategorikan dua jenis sumber yang dapat dijadikan dasar dalam penulisan sejarah, yakni sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer tertulis yang digunakan dalam penelitian berasal dari arsip dan surat kabar. Pencarian arsip dilakukan di Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur (ARSIP JATIM). Data yang didapatkan berupa tulisan Belanda sehingga perlu diartikan terlebih dahulu. Selain itu ada surat kabar berupa koran-koran lama melalui website Delpher, ada juga sumber gambar atau foto yang didapatkan dari web KITLV. Sedangkan Sumber sekunder berupa literasi-literasi terkait dan se-tema yang ditemukan di Perpustakaan Pusat Kampus B Unair, Perpustakaan Ilmu Sejarah Unair.

Tahapan kritik sumber digunakan sebagai upaya untuk mendapatkan otentisitas dan kredibilitas sumber yang sudah terkumpul. Sumber yang telah

²⁷ A. Daliman, *Metode Penelitian Sejarah* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012), hlm. 28-29

²⁸ Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003) hlm. 81

terkumpul diidentifikasi kembali dan dikaji ulang untuk mendapat kelayakan sumber-sumber yang telah didapatkan penulis. Dari sumber yang diperoleh apakah isinya telah memuat temporal yang telah ditetapkan penulis. Hal tersebut dapat digunakan sebagai rujukan bagi penulis.

Tahap selanjutnya adalah interpretasi atau tahap penafsiran. Tahap ini merupakan tahap kerja dari peneliti sejarah, kemudian dihubungkan antara fakta yang satu dengan fakta yang lain melalui penafsiran sehingga ketika penyusunan dilakukan, fakta itu menjadi relevan dalam mendukung penulisan. Agar interpretasi dapat membentuk suatu alur cerita yang berlanjut, maka fakta-fakta yang telah ditemukan, disusun berdasarkan urutan kejadian sesuai temporal penelitian dalam babakan waktu yang telah dibuat berdasarkan peristiwa yang ditulis. Dalam melakukan interpretasi ini penulis dibantu dengan sejumlah bahan-bahan Pustaka, buku, jurnal, skripsi maupun artikel yang mengulas topik serupa. Sehingga kemudian dapat masuk dalam tahap selanjutnya yaitu tahap penulisan sejarah atau tahap Historiografi.

Tahap selanjutnya penulisan sejarah atau historiografi merupakan tahap akhir dalam penelitian Buruh Perkebunan Kopi di Kediri. Pada tahapan ini penulis menyajikan secara lengkap bahasan yang telah dipilih. Setelah fakta-fakta yang tersusun secara sistematis diharapkan mampu membentuk kejelasan sejarah yang disusun menjadi tulisan atau hasil dari penelitian sejarah dengan narasi yang baik. Dengan itu didapatkan suatu fakta baru yang berhasil diperoleh dari penelitian ini. Penafsiran atas fakta harus didasari oleh sikap objektif. Meskipun kemungkinan

dalam beberapa hal ada yang bersifat subjektif, harus dipakai adalah subjektif yang rasional bukan emosional.

1.8 Sistematika Penulisan

Bab I adalah pendahuluan yang dibagi menjadi menjadi 8 sub bab. Pertama adalah latar belakang dan permasalahan yang menjelaskan uraian dari perkebunan di Kediri beserta alasan pemilihan tema penelitian. Sub bab kedua berisi rumusan permasalahan, yaitu permasalahan yang dibahas dan di analisis dalam penulisan skripsi. Sub bab ketiga berisi tujuan dan manfaat penulisan skripsi. Sub bab keempat merupakan batasan dan ruang lingkup penelitian mengenai pengambilan tema dalam skripsi. Sub bab kelima kerangka konseptual merupakan kerangka berpikir peneliti yang mengacu pada konsep-konsep atau teori-teori mengenai manajemen perkebunan seperti produksi dan distribusi kopi. Sub bab keenam adalah tinjauan pustaka. Sub bab ketujuh merupakan metode penulisan yang tidak lepas dari metode historiografi sejarah, dan yang terakhir adalah sistematika penulisan yang merupakan penjelasan sistematis dari bab-bab yang ditulis dalam skripsi.

Bab II berisi gambaran umum tentang Kediri. Dalam pembahasan ini dibagi menjadi beberapa sub bab yang membahas soal kondisi geografis, kondisi sosial masyarakat Kediri, lahan dan tenaga kerja di Kediri, industrialisasi di Kediri. Proses industrialisasi tidak dapat dilepaskan dalam penulisan sejarah perburuan yang pada akhirnya oleh karena adanya proses industrialisasi mulai munculah kelas buruh. Terakhir membahas lahan dan tenaga kerja.

Bab III secara garis besar membahas tentang aktivitas buruh perkebunan kopi di Kediri. Dalam pembahasan ini dibagi menjadi beberapa sub bab yang membahas soal kondisi perkebunan kopi abad ke XIX-XX di Kediri, Struktur sosial dan kekuasaan, organisasi kerja dan perekrutan kerja, kehidupan ekonomi buruh, kegiatan para buruh perkebunan, sistem upah, pemukiman para buruh, Kesehatan para buruh, terakhir membahas kriminilitas di perkebunan.

Bab IV membahas tentang depresi dan dampak terhadap perburuhan di Kediri yang dibagi menjadi beberapa sub bab yang pertama krisis dan depresi ekonomi yang terjadi pada abad ke XIX-XX, kemudian membahas dampak krisis ekonomi pada perburuhan dan perkebunan di Kediri.

Bab V berisi penutup dan simpulan dari hasil pembahasan penulisan. Dalam bab ini berisi inti sari maupun hasil simpulan dari pembahasan penulisan. Simpulan dalam bab ini merupakan pembacaan dan analisis dari pembahasan terhadap data yang ada sekaligus sebagai penutup penulisan.